

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adam Chazawi, 2005. *"Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia"*, Malang : Bayu Media Publishing.

Andi Hamzah, 2007. *"Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

A. Djoko Sumaryanto, 2009. *"Pembalikan Beban Pembuktian Tipikor dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara"*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.

A. Y. Suryanajaya, 2008. *"Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik, Masalah dan Penyelesaian"*, Jakarta : Eko Jaya.

Aziz Syamsudin, 2017. *"Tindak Pidana Khusus"*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Bambang Sunggono, 2007. *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Darwin Prins, 2002. *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Bandung : PT. Citra Adtya Bakti.

Elwi Danil, 2011. *"Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya"*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Evi Hartanti, 2008. *"Tindak Pidana Korupsi"*, Jakarta : Sinar Grafika.



Farida Patittingi & Fajlurrahman Jurdi, 2016. *“Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di atas Hegemoni Oligarki”*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Firman Wijaya, 2019. *“Makalah Peluang, Tantangan Pengaturan dan Penegakan Hukum”*. Jakarta.

Hafidz Jawade Arsyad, 2015. *“Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)”*, Jakarta : Sinar Grafika.

Indroharto, 1993. *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, Jakarta : Sinar Harapan.

Ismansyah, 2015. *“Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan”* Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Jimly Asshidiqie, 2010. *“Perihal Undang-Undang”*, Jakarta : Rajawali Press.

Lilik Mulyadi, 2000. *“Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut UU No.30 tahun 1999”*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Mahrus Ali, 2011. *“Hukum Pidana Korupsi di Indonesia”*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.

Maria Farida, 1998. *“Ilmu Perundang-Undangan”*, Yogyakarta : Kanisius.

Nur Basuki Winarno, 2009. *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”*, Yogyakarta : Laksabang Mediatama.

Nyoman Putra Jaya Serikat, 2008. *“Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana”*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Philipus M. Hadjon, 1993. *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Ridwan HR, 2006. *“Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Robert Klitgaard, 1998. *“Membasmi Korupsi”*. Jakarta : Yayasan Obor.

Romy Hanitijo, 1993. *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta : Ghalia Indo.

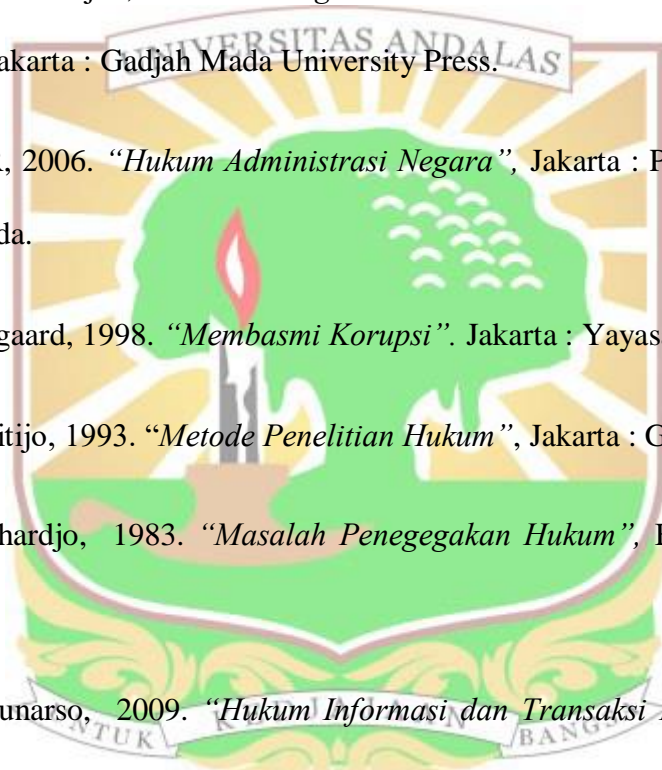
Satjipto Rahardjo, 1983. *“Masalah Penegeakan Hukum”*, Bandung : Sinar Baru.

Siswanto Sunarso, 2009. *“Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari”*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 2012. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2001. *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 1986. *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta : UI Press.



\_\_\_\_\_, 1982. *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, Jakarta : Rajawali Press.

Sugiyono, 2006. *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Bandung : Alfabeta.

R. Wiryo, 2005. *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Jakarta : Sinar Grafika.

W. Riawan Tjandra, 2006. *“Hukum Keuangan Negara”*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. 1979, Pustaka Amani, Muhammad Ali.

*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 1999, Jakarta, Agung Media Mulia, Tanti Yuniar.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Keputusan Presiden No.192 tahun 2014 tentang BPKP.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2016.

### C. JURNAL

Ateng Syafrudin, 2000. “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justitia Edisi, IV, Bandung : Universitas Parahyangan diakses terakhir kali pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 20.20 WIB.

### D. INTERNET

<https://m.merdeka.com>, diakses terakhir kali pada tanggal 08 Mei 2020 pukul 23.58 WIB

